



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : KEPANITERAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIRYANTO**
2. Jabatan : **PANITERA KONSTITUSI AHLI UTAMA**
3. NHK : **111991**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.807.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 665.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/84 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 665.000.000
4. Tanah Seluas 245 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
5. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 120.400.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
3. MOTOR, YAMAHA BJ8 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
4. MOBIL, TOYOYA AVANZA 1.5 VELOZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 30.225.650



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	914.329.690
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.871.955.340
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.871.955.340

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.